



**KEUANGAN DAERAH**

# Strategi Capai Pertumbuhan Delapan Persen

**PEMERINTAH** berupaya mewujudkan target pertumbuhan ekonomi delapan persen. Kinerja pemerintah daerah (pemda) menjadi penting untuk mencapai target tersebut. Salah satu strateginya mempercepat digitalisasi keuangan daerah.

Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil Kementerian Koordinator Perekonomian Puji Gunawan mengatakan, tekanan ekonomi global juga semakin besar. Mulai dari tensi geopolitik yang tak kunjung mereda, perubahan iklim, hingga volatilitas pasar keuangan.

"Donald Trump telah menang pilpres AS. Kondisi itu bisa menjadi faktor tekanan kalau perang dagang jilid II terjadi. Itu juga bisa faktor tekanan ekonomi," jelasnya saat membuka Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Surabaya, kemarin (7/11).

Padahal, Indonesia harus memacu roda ekonomi untuk mencapai pertumbuhan delapan persen. Roadmap pertumbuhan sudah dimulai sejak tahun depan dengan target sebesar 5,2 persen. Setelah itu, proyeksinya bisa naik satu basis poin setiap tahun hingga, bisa mencapai 8 persen pada 2028.

**Adopsi ETPD sebenarnya sudah cukup baik. Dari 543 pemerintah daerah, 480 sudah tergolong sebagai Pemda Digital.**

**Puji Gunawan**

"Pertumbuhan ini juga tidak akan tercapai kalau kinerja ekonomi daerah tidak mumpuni. Karena itu, kami juga mendorong agar kinerja pemda dalam mengelola ekonomi bisa lebih efisien dan maksimal," imbuhnya.

Percepatan digitalisasi daerah, lanjut dia, merupakan salah satu langkah untuk bisa memastikan kinerja pemda mengelola keuangan dan perizinan bisa lebih efisien. Direktur Departemen Regional Bank Indonesia M Firdaus Muttaqin mengatakan, salah satu inisiatif digitalisasi pemerintah daerah adalah program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Rata-rata pemerintah yang telah menerapkan ETPD berhasil mencapai 30 persen dari target pajak daerah serta 27 persen target retribusi daerah. Sedangkan, yang belum sama sekali belum menerapkan digitalisasi hanya bisa mencapai 21 persen target pajak daerah dan 5 persen retribusi daerah.

"Adopsi ETPD sebenarnya sudah cukup baik. Dari 543 pemerintah daerah, 480 sudah tergolong sebagai Pemda Digital," tuturnya.

Namun, dia mengatakan bahwa masih ada beberapa daerah yang harus mendapatkan perhatian. Misalnya, Sulawesi (Sulawesi, Maluku, dan Papua) yang integrasi ETPD untuk kanal non digital baru mencapai 55,3 persen. Sedangkan kanal digital baru 69,2 persen.

Angka itu masih jauh dibandingkan rata-rata nasional integrasi ETPD kanal non digital sebesar 73,5 persen dan kanal digital sebesar 85,1 persen. "Kami terus berupaya agar nantinya adopsi digital itu bukan hanya lebih namun juga merata," tuturnya. **(bil/dio)**